

Membasuh Korupsi, Menyuiap Auditor

Suap status WTP adalah kejahatan untuk menutupi kejahatan. Stop insentif yang menjadi perantara.

STATUS audit “wajar tanpa pengecualian” (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan ibarat barang dagangan bagi para koruptor. Sejak 2005, setidaknya ada tujuh kasus suap pejabat pemerintah kepada auditor BPK yang terungkap. Mereka menyuiap auditor negara untuk mendapatkan status audit laporan keuangan tertinggi ini.

Dari tujuh kasus yang terekspos, kepala daerah paling banyak menjadi pesakitan. Kasus suap WTP terbaru melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ade Yasin di rumahnya pada Rabu, 27 April lalu, sesuai penangkapan empat auditor BPK Jawa Barat di Bandung. Penyidik KPK menduga Ade memerintahkan tiga anak buahnya menyuiap auditor BPK untuk mendapatkan status WTP laporan keuangan 2021. Ada 12 orang yang menjadi tersangka perkara ini, dengan barang bukti suap sekitar Rp 1,024 miliar.

Dari penyelidikan awal, KPK menduga Ade Yasin menyuiap untuk menutupi kinerja buruk perbaikan jalan Kandang Roda-Pakansari, bagian dari program Cibinong City A Beautiful di ibu kota Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu. BPK menemukan potensi penyimpangan yang membuat laporan keuangan Bogor bisa berstatus “*disclaimer*” atau tanpa pendapat.

Ade Yasin, adik Bupati Bogor Rachmat Yasin yang juga masuk penjara karena korupsi, tipikal kepala daerah yang kisruh dalam bekerja tapi ingin mendapatkan citra baik di masyarakat. Ade ingin laporan keuangan Kabupaten Bogor kembali mendapatkan status WTP dua tahun berturut-turut. Sesuai kejadian ini seharusnya KPK mengembangkan penyelidikan jauh ke belakang. Status WTP yang diperoleh Kabupaten Bogor pada 2020 juga perlu diusut karena boleh jadi terbit berkat uang suap.

Suap WTP terjadi karena faktor penarik dan pendorong.

Faktor penariknya antara lain godaan untuk mendapat dukungan dari pemilih. Ade Yasin, yang hendak maju lagi dalam pemilihan Bupati Bogor tahun depan, sepertinya menganggap status WTP sebagai penutup segala borok di periode pertama jabatannya. Seperti para calon inkumben lain, Ade berburu status WTP untuk *jualan* di masa kampanye demi mempertahankan jabatan sampai periode kedua.

Adapun faktor pendorong terjadinya suap WTP datang dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah menetapkan alokasi sejumlah jenis dana, antara lain dana insentif daerah (DID). Dana insentif ini diniatkan sebagai penghargaan pemerintah pusat kepada daerah yang berkinerja bagus.

Kementerian Keuangan menetapkan status WTP dari BPK sebagai kriteria utama daerah yang mendapatkan DID. Memakai rumus yang rumit, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mentransfer dana insentif kepada daerah yang memenuhi kriteria. Pada 2021, dari 514 kabupaten dan kota, ada 445 daerah yang mendapatkan DID, naik dibanding 2020 yang hanya 425.

Tiap daerah rata-rata mendapatkan dana insentif Rp 32 miliar setahun.

Ketika telah menjadi barang dagangan, opini WTP dari BPK hanyalah status administrasi laporan keuangan. Status WTP sama sekali bukan jaminan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Kementerian Keuangan semestinya tidak mengaitkan alokasi DID dengan status WTP. Dana yang memang menjadi hak daerah seharusnya diberikan tanpa embel-embel “insentif” yang dikaitkan dengan status WTP. Sementara itu, setiap menjelang pemilihan kepala daerah, pemilih jangan mau dibodohi oleh calon inkumben yang *jualan* status WTP palsu.

BERITA TERKAIT HALAMAN 58



Ancaman Demokrasi dari Filipina

Kemenangan Ferdinand Marcos Jr. dalam pemilihan presiden di Filipina mengancam kehidupan demokrasi Indonesia. Sejarah bisa dimanipulasi dengan kabar bohong.

KEMENANGAN Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dalam pemilihan Presiden Filipina adalah kabar buruk bagi kehidupan demokrasi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Terpilihnya anak diktator Ferdinand Marcos itu dimungkinkan dengan penyebaran kabar bohong yang menutupi fakta kekejaman dan korupsi ayahnya pada 1965-1986.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa Filipina memiliki sejarah politik yang mirip dengan Indonesia: sama-sama pernah dipimpin seorang diktator. Sementara Filipina selama 20 tahun dipimpin Marcos, Indonesia “dikuasai” Soeharto selama 32 tahun. Keduanya terguling lewat gerakan “*people power*”. Soeharto, sebagaimana Marcos, masih memiliki barisan loyalis hingga kini.

Rekam jejak Marcos sungguh buruk. Ia dan keluarganya dituding menggelapkan uang negara sebanyak US\$ 10 miliar saat berkuasa. Pengadilan sudah menghukum Marcos dengan membayar denda US\$ 353,6 juta karena tuduhan korupsi. Tapi uang itu tak pernah disetorkan ke negara. Istrinya, Imelda Marcos, divonis tujuh tahun penjara pada 2018, juga karena tuduhan rasuah. Sejarah juga mencatat kekejaman Marcos yang memerintahkan pembunuhan 3.200 rakyatnya sendiri.

Tapi dosa-dosa ini dianggap angin lalu oleh para pendukung Marcos Jr. Selama masa kampanye, tim kampanye Bongbong memproduksi informasi sesat dan video propaganda lewat media sosial yang menyatakan ekonomi Filipina maju pesat saat dipimpin ayahnya. Yang tak kalah buruk, ia memfitnah lawan terkuatnya, Leni Robredo, pengacara hak asasi manusia